

Perkembangan Sistem Ekonomi di Indonesia

Dedi Susanto¹, Amiruddin²
^{1,2} Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Histori Naskah

Diserahkan:
19-06-2025

Direvisi:
28-08-2025

Diterima:
06-09-2025

Keywords

ABSTRACT

This study examines the development of Indonesia's economic system from the early independence period, the New Order era, to the Reform era, highlighting the dynamics of policy changes, challenges faced, and their implications for public welfare. In the early independence period, the economy was characterized by etatism, with the state acting as the main controller; however, weak infrastructure and political instability hindered its effectiveness. The New Order era was marked by rapid economic growth through a mixed economic model and industrialization, yet it was overshadowed by inequality, dependence on oil and foreign debt, as well as corruption, collusion, and nepotism (KKN). Meanwhile, the Reform era introduced market liberalization and global openness, although issues of equity, economic sovereignty, and foreign capital dominance remained unresolved. Using a descriptive qualitative approach, this study emphasizes that the success of Indonesia's economic development depends on balancing market efficiency, political stability, good governance, and the implementation of social justice principles in accordance with Article 33 of the 1945 Constitution.

: Indonesian Economic System, Old Order, New Order, Reform Era

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji perkembangan sistem ekonomi Indonesia dari masa awal kemerdekaan, Orde Baru, hingga era Reformasi dengan menekankan dinamika perubahan kebijakan, tantangan yang dihadapi, serta implikasinya terhadap kesejahteraan masyarakat. Pada masa awal kemerdekaan, perekonomian bercorak etatisme dengan negara sebagai pengendali utama, namun kondisi politik dan infrastruktur yang rapuh menyebabkan sistem ini tidak berjalan efektif. Era Orde Baru ditandai dengan pertumbuhan ekonomi tinggi melalui model campuran dan industrialisasi, tetapi dibayang-bayangi oleh ketimpangan, ketergantungan pada minyak dan utang luar negeri, serta praktik KKN. Sementara itu, era Reformasi membawa liberalisasi pasar dan keterbukaan global, meskipun masih menyisakan persoalan pemerataan, kedaulatan ekonomi, dan dominasi modal asing. Melalui pendekatan kualitatif deskriptif, penelitian ini menegaskan bahwa keberhasilan pembangunan ekonomi Indonesia sangat ditentukan oleh keseimbangan antara efisiensi pasar, stabilitas politik, tata kelola yang baik, serta penerapan prinsip keadilan sosial sesuai amanat Pasal 33 UUD 1945.

Kata Kunci : Sistem Ekonomi Indonesia, Orde Lama, Orde Baru, Era Reformasi

Corresponding Author : Dedi Susanto, e-mail: dedisusantoktg@gmail.com

PENDAHULUAN

Indonesia memiliki sejarah panjang dalam perjalanan sistem ekonominya. Sejak proklamasi kemerdekaan pada tahun 1945, Indonesia telah melalui berbagai fase perkembangan yang mencerminkan adaptasi terhadap kondisi sosial, politik, serta dinamika global. Pada masa awal kemerdekaan, sistem ekonomi Indonesia cenderung terpusat dengan pemerintah sebagai aktor utama (Sudarto, 2021). Namun, seiring waktu, perubahan demi perubahan terjadi hingga melahirkan sistem yang lebih terbuka dan terintegrasi dengan ekonomi internasional, menandakan fleksibilitas bangsa dalam menghadapi tantangan zaman.

Sistem ekonomi di Indonesia tidak hanya dibangun berdasarkan kepentingan pragmatis semata, tetapi juga memperhatikan nilai budaya dan agama yang melekat dalam kehidupan masyarakat. Islam, sebagai agama mayoritas, memberikan landasan normatif yang kuat mengenai keadilan, keseimbangan, serta distribusi kekayaan yang merata (Irwan, 2021). Prinsip dalam ekonomi Islam menekankan harmoni antara kepentingan duniawi dan ukhrawi, sekaligus menempatkan kesejahteraan masyarakat di atas kepentingan individu semata. Ajaran ini sejalan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Al-Qur'an dan Hadits Nabi Muhammad SAW, yang menjadi pedoman moral dalam praktik ekonomi sehari-hari.

Al-Qur'an, misalnya, dalam Surah Al-Baqarah ayat 261 menggambarkan pentingnya menafkahkan harta di jalan Allah dengan penuh keikhlasan, yang diibaratkan seperti benih yang tumbuh berlipat ganda (Setiawan, 2015). Ajaran ini tidak hanya terkait dengan sedekah, tetapi juga memiliki relevansi dalam pengelolaan ekonomi yang adil dan berkelanjutan. Begitu pula Hadits Nabi Muhammad SAW yang menekankan kejujuran dalam transaksi, menolak segala bentuk penipuan, dan mengedepankan transparansi. Nilai-nilai ini penting untuk membangun sistem ekonomi nasional yang berlandaskan keadilan, kejujuran, dan integritas, sehingga mampu memberikan manfaat luas bagi seluruh lapisan masyarakat.

Sejarah mencatat bahwa sejak masa Orde Lama hingga era Reformasi, sistem ekonomi Indonesia mengalami transformasi besar. Dari sistem yang sangat terpusat, kemudian bergeser menuju ekonomi campuran dengan peluang lebih besar bagi swasta dan investasi asing, hingga terbuka terhadap globalisasi ekonomi pada era Reformasi. Transformasi ini diiringi dengan upaya pemerintah untuk menjaga integrasi ekonomi domestik, mengurangi kesenjangan sosial, serta membangun pemerataan kesejahteraan. Namun, tantangan tetap muncul, seperti ketergantungan pada pasar global, fluktuasi harga komoditas, dan kesenjangan antarwilayah. Dengan latar belakang inilah, penelitian ini berupaya mengkaji lebih dalam perkembangan sistem ekonomi di Indonesia, serta peran nilai agama dan budaya dalam memperkuat sistem ekonomi yang berkeadilan, inklusif, dan berkelanjutan.

Kajian mengenai perkembangan sistem ekonomi Indonesia telah banyak dilakukan oleh para peneliti dengan fokus dan pendekatan yang beragam. Rahman (2023) menyoroti masa awal kemerdekaan yang ditandai dengan dominasi negara dalam mengelola sektor-sektor strategis, namun menghadapi tantangan berupa inflasi dan instabilitas politik. Hermanita (2021) menambahkan bahwa periode 1945–1966 ditandai oleh kebijakan trial and error yang justru menimbulkan distorsi ekonomi, meskipun bertujuan untuk memperkuat peran negara. Pada masa Orde Baru, penelitian menekankan pada pertumbuhan ekonomi yang impresif melalui industrialisasi dan investasi asing, namun masih dibayangi oleh ketimpangan sosial serta praktik KKN (Hermanita, 2021). Sementara itu, studi lain menunjukkan bahwa krisis moneter 1997–1998 menjadi titik balik lahirnya Reformasi yang membawa kebijakan liberalisasi dan keterbukaan pasar, meskipun problem struktural seperti ketergantungan pada pasar global dan kesenjangan sosial tetap muncul (Sunardi et al., 2024; Hadi et al., 2024). Dengan demikian, kajian terdahulu menegaskan bahwa perubahan sistem ekonomi Indonesia

sangat dipengaruhi oleh dinamika politik, kebijakan makro, serta interaksi dengan ekonomi global.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perkembangan sistem ekonomi Indonesia dari masa awal kemerdekaan hingga era Reformasi dengan menelaah dinamika kebijakan, tantangan yang dihadapi, serta implikasinya terhadap kesejahteraan masyarakat. Pertanyaan penelitian yang diajukan adalah: (1) Bagaimana perubahan sistem ekonomi Indonesia berlangsung pada setiap periode sejarah? (2) Faktor-faktor apa saja yang memengaruhi keberhasilan dan kegagalan kebijakan ekonomi di masing-masing era? dan (3) Bagaimana relevansi nilai-nilai Pancasila dan prinsip keadilan sosial dalam pembangunan ekonomi Indonesia? Signifikansi penelitian ini terletak pada kontribusinya dalam memperkaya literatur tentang sejarah ekonomi Indonesia, memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai hubungan antara politik dan ekonomi, serta menawarkan dasar analitis bagi perumusan kebijakan ekonomi yang lebih adil, berkelanjutan, dan sesuai dengan amanat konstitusi.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif yang bertujuan untuk menggali dan menganalisis perkembangan sistem ekonomi di Indonesia serta dampaknya terhadap kesejahteraan masyarakat. Fokus penelitian diarahkan pada pemahaman mendalam mengenai dinamika sistem ekonomi Indonesia dalam berbagai periode sejarah, sekaligus menelaah peran nilai-nilai agama, budaya, dan kebijakan yang memengaruhi integrasi ekonomi. Desain penelitian bersifat deskriptif analitis, di mana peneliti berupaya menghubungkan perkembangan kebijakan ekonomi dengan pengaruh norma sosial budaya dan prinsip keagamaan yang hidup di masyarakat. Untuk itu, penelitian ini mengandalkan studi pustaka secara komprehensif terhadap literatur, jurnal, artikel, serta buku-buku yang relevan (Zed, 2008), dilengkapi dengan analisis dokumen resmi seperti kebijakan pemerintah, laporan lembaga ekonomi, dan data statistik nasional.

Data yang terkumpul kemudian dianalisis dengan beberapa teknik. Pertama, analisis konten digunakan untuk mengeksplorasi dan mengidentifikasi tema-tema utama mengenai sistem ekonomi Indonesia, proses integrasi ekonomi, serta nilai-nilai agama yang tercermin dalam kebijakan. Kedua, analisis deskriptif dipakai untuk menggambarkan perkembangan sistem ekonomi dari masa ke masa sekaligus memetakan faktor-faktor yang berpengaruh terhadap integrasi domestik maupun internasional. Ketiga, analisis naratif diterapkan untuk menggali lebih dalam tentang peran agama dan budaya, dengan menelaah pandangan yang terdapat dalam teks-teks keagamaan seperti Al-Qur'an dan Hadits. Dengan kombinasi teknik ini, penelitian diharapkan mampu memberikan gambaran komprehensif tentang perkembangan sistem ekonomi Indonesia dan landasan filosofis yang menopangnya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sejarah Perkembangan Sistem Ekonomi Indonesia

1. Periode Awal Kemerdekaan (1945-1966).

Pada masa awal kemerdekaan, Indonesia menganut sistem ekonomi yang cenderung terpusat dengan pemerintah sebagai pengendali utama. Negara berusaha mengambil alih peran penting dalam mengatur sektor-sektor strategis seperti pertambangan, perindustrian, dan distribusi barang guna menjamin pemerataan kesejahteraan di tengah keterbatasan sumber daya serta infrastruktur yang masih minim. Seluruh kekayaan alam pada prinsipnya dikelola untuk kepentingan rakyat, sejalan dengan amanat konstitusi. Namun, kondisi ekonomi saat itu menghadapi tekanan berat berupa inflasi yang tinggi, merosotnya nilai mata uang, defisit

neraca pembayaran, dan meningkatnya pengangguran, baik di perkotaan maupun pedesaan. Situasi ini semakin kompleks karena pemerintah juga disibukkan oleh pergolakan politik dan keamanan yang mengancam stabilitas nasional (Rahman, 2023).

Pada masa awal kemerdekaan, sistem ekonomi Indonesia sering disebut sebagai ekonomi etatisme, di mana negara memegang peranan yang sangat dominan dalam mengendalikan perekonomian. Peran besar pemerintah diwujudkan melalui nasionalisasi aset-aset asing, pembentukan BUMN, serta pengaturan distribusi barang kebutuhan pokok demi menjamin pemerataan. Namun, kondisi ekonomi saat itu menghadapi tantangan serius berupa rendahnya produksi, keterbatasan devisa, dan ketidakstabilan politik. Hal ini membuat perekonomian nasional masih rapuh dan sangat bergantung pada upaya pemerintah untuk mengendalikan harga serta menjaga ketersediaan barang-barang penting (Hermanita, 2021).

Selain itu, periode 1945–1966 ditandai oleh berbagai kebijakan ekonomi yang bersifat trial and error. Pemerintah mencoba menerapkan sistem ekonomi terpimpin pada akhir 1950-an hingga 1960-an dengan harapan mampu mengatasi ketidakstabilan. Namun, kebijakan tersebut justru memunculkan distorsi ekonomi karena pengendalian berlebihan dari negara, inflasi yang sangat tinggi, serta lemahnya basis produksi nasional. Meskipun demikian, periode ini memberikan pelajaran penting bahwa keberhasilan pembangunan ekonomi tidak hanya membutuhkan peran negara sebagai pengatur, tetapi juga dukungan stabilitas politik, tata kelola yang baik, dan partisipasi masyarakat dalam kegiatan ekonomi (Hermanita, 2021).

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa memburuknya perekonomian Indonesia pada masa pemerintahan Orde Lama terutama disebabkan oleh kehancuran infrastruktur ekonomi, baik fisik maupun nonfisik, akibat pendudukan Jepang, Perang Dunia II, serta perang revolusi. Kondisi tersebut diperparah oleh gejolak politik dalam negeri, termasuk berbagai pemberontakan di daerah, serta lemahnya manajemen ekonomi makro selama rezim tersebut. Dalam situasi politik dan sosial yang penuh ketidakstabilan seperti itu, sangat wajar apabila pemerintah mengalami kesulitan besar dalam mengelola roda perekonomian secara efektif (Miftahudin, 2018).

2. Masa Orde Baru (1966-1998).

Pada era Orde Baru, Indonesia beralih ke sistem ekonomi campuran. Pemerintah membuka peluang bagi sektor swasta dan investasi asing untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Beberapa kebijakan yang diterapkan pada masa ini termasuk pembangunan kawasan industri, promosi ekspor, dan peningkatan sektor pertanian dan perindustrian. Meskipun terjadi pertumbuhan yang signifikan, tetap ada kontrol negara terhadap sektor-sektor strategis, seperti energi dan sumber daya alam.

Pada masa Orde Baru, sistem ekonomi Indonesia mulai diarahkan ke model ekonomi campuran yang lebih menekankan pada stabilitas politik dan pembangunan jangka panjang. Pemerintah membuka pintu investasi asing melalui UU Penanaman Modal Asing (1967) dan mendorong swasta nasional untuk ikut aktif dalam pembangunan ekonomi. Strategi pembangunan lima tahunan (REPELITA) menjadi kerangka utama kebijakan ekonomi, dengan fokus pada sektor pertanian, khususnya program Revolusi Hijau yang meningkatkan produksi pangan. Selain itu, pemerintah juga membangun infrastruktur dasar dan kawasan industri guna memperkuat basis produksi nasional serta memperluas pasar ekspor (Hermanita, 2021).

Namun, di balik pertumbuhan ekonomi yang tinggi pada dekade 1980-an hingga awal 1990-an, terdapat berbagai masalah struktural. Buku *Perekonomian Indonesia* menekankan bahwa pertumbuhan saat itu masih sangat bergantung pada ekspor minyak dan gas, serta pinjaman luar negeri. Ketergantungan tersebut menjadikan ekonomi rentan terhadap fluktuasi harga komoditas dunia. Selain itu, praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) dalam

pengelolaan sumber daya ekonomi menyebabkan distribusi hasil pembangunan tidak merata. Ketimpangan pendapatan antarwilayah maupun antar kelompok sosial semakin melebar, sehingga meskipun pertumbuhan ekonomi terlihat impresif, fondasi perekonomian nasional masih rapuh ketika menghadapi krisis moneter 1997–1998 (Hermanita, 2021).

3. Era Reformasi (1998-Sekarang).

Krisis moneter 1997–1998 menjadi titik balik bagi ekonomi Indonesia. Setelah krisis, Indonesia mulai mengimplementasikan kebijakan liberalisasi pasar dan memperkecil peran negara dalam ekonomi. Indonesia semakin terbuka terhadap globalisasi ekonomi, baik dalam bentuk perdagangan bebas maupun arus modal internasional. Indonesia juga memperkenalkan berbagai kebijakan untuk menjaga kestabilan ekonomi, meningkatkan daya saing, dan mendorong pembangunan yang lebih merata. Meskipun demikian, Indonesia masih menghadapi tantangan ketergantungan terhadap pasar global dan fluktuasi harga komoditas.

Krisis moneter 1997–1998 tidak hanya melumpuhkan perekonomian, tetapi juga menandai berakhirnya Orde Baru dan lahirnya era Reformasi. Pasca-krisis, Indonesia mulai mengadopsi berbagai kebijakan liberalisasi ekonomi yang menekankan penguatan mekanisme pasar, deregulasi, serta pengurangan peran negara dalam mengelola perekonomian (Sunardi dkk., 2024). Restrukturisasi perbankan, privatisasi beberapa BUMN, dan deregulasi investasi menjadi langkah strategis untuk memulihkan kepercayaan investor. Selain itu, pemerintah memperkenalkan berbagai instrumen baru untuk menjaga stabilitas moneter dan fiskal, termasuk reformasi dalam pengelolaan APBN serta peningkatan transparansi kebijakan ekonomi (Hadi dkk., 2024).

Sejalan dengan semakin terbukanya ekonomi Indonesia terhadap arus globalisasi, pemerintah juga menekankan pentingnya daya saing nasional melalui promosi ekspor nonmigas, pengembangan sektor industri manufaktur, serta dukungan bagi UMKM sebagai motor pertumbuhan ekonomi. Namun, seperti dicatat dalam buku *Perekonomian Indonesia*, tantangan besar tetap muncul dalam bentuk ketergantungan pada pasar global, fluktuasi harga komoditas, serta masalah struktural seperti ketimpangan pembangunan antarwilayah dan kesenjangan sosial. Oleh karena itu, pembangunan ekonomi di era Reformasi berfokus tidak hanya pada pertumbuhan, tetapi juga pada pemerataan dan keberlanjutan, yang diintegrasikan ke dalam kebijakan pembangunan jangka menengah dan panjang.

Pada era Reformasi, perekonomian Indonesia mengalami perubahan signifikan setelah runtuhnya rezim Orde Baru. Meskipun secara politik sistem menjadi lebih terbuka dan demokratis, dalam praktik ekonomi masih terdapat kesinambungan dengan model pembangunan sebelumnya. Kebijakan ekonomi diwarnai oleh pengurangan subsidi kebutuhan dasar seperti BBM, listrik, dan pupuk, serta privatisasi BUMN yang memicu kontroversi, misalnya penjualan saham Indosat dan Telkomsel kepada investor asing. Industri kecil dan rumah tangga yang umumnya dikelola pribumi masih lemah posisinya, sementara industri menengah dikuasai oleh kelompok tertentu dan industri besar banyak dikendalikan oleh perusahaan multinasional. Akibatnya, demokrasi ekonomi yang seharusnya menempatkan rakyat sebagai pelaku utama belum sepenuhnya terwujud, karena pertumbuhan ekonomi tetap lebih menekankan liberalisasi pasar dibanding pemerataan kesejahteraan. Namun demikian, lahirnya kebijakan seperti Otonomi Daerah (UU No. 22/1999) menjadi langkah awal menuju demokrasi ekonomi yang lebih partisipatif, meskipun implementasinya masih menghadapi berbagai tantangan.

Perkembangan sistem ekonomi Indonesia dari masa kemerdekaan hingga era Reformasi menunjukkan adanya pola transisi dari ekonomi etatisme menuju ekonomi pasar terbuka. Pada masa awal kemerdekaan, dominasi negara dalam mengendalikan sektor-sektor strategis dapat

dipahami melalui teori *developmental state*, di mana pemerintah memegang kendali penuh untuk membangun fondasi ekonomi (Winanti, 2003). Namun, lemahnya infrastruktur, keterbatasan devisa, dan instabilitas politik menjadikan sistem ini tidak efektif. Seperti dikemukakan Hermanita (2021), kebijakan ekonomi kala itu cenderung trial and error, sehingga lebih menimbulkan distorsi daripada menghasilkan pertumbuhan yang berkelanjutan. Implikasinya, penelitian tentang periode ini penting untuk memahami bahwa peran negara saja tidak cukup tanpa dukungan stabilitas politik, tata kelola ekonomi yang baik, serta partisipasi masyarakat.

Memasuki Orde Baru, model ekonomi campuran dengan corak kapitalisme negara (state capitalism) menunjukkan keberhasilan dalam mencapai pertumbuhan tinggi. Hal ini sejalan dengan teori pertumbuhan modern yang menekankan pentingnya investasi asing, industrialisasi, dan modernisasi pertanian sebagai motor pembangunan. Namun, persoalan mendasar terletak pada distribusi hasil pembangunan. Teori trickle-down effect yang menjadi asumsi pembangunan kala itu terbukti tidak berjalan, ditandai dengan melebarnya kesenjangan sosial-ekonomi. Ketergantungan pada minyak, pinjaman luar negeri, serta praktik KKN memperlihatkan rapuhnya struktur ekonomi meski pertumbuhan tampak impresif. Dengan demikian, penelitian lebih lanjut dapat mengkaji kegagalan mekanisme trickle-down dalam konteks Indonesia, sekaligus menawarkan alternatif model pemerataan yang lebih adil.

Sementara itu, era Reformasi membawa perubahan paradigma menuju liberalisasi ekonomi yang lebih terbuka. Implementasi deregulasi, privatisasi, dan pengurangan subsidi sejalan dengan teori **neoliberalisme**, yang menekankan efisiensi pasar dan peran minimal negara. Akan tetapi, kebijakan ini justru menimbulkan problem baru: semakin kuatnya dominasi modal asing, lemahnya sektor UMKM, dan belum terwujudnya demokrasi ekonomi sebagaimana amanat Pasal 33 UUD 1945. Hal ini menunjukkan adanya ketegangan antara ideologi ekonomi Pancasila dengan praktik pasar bebas global. Implikasi penelitian dari periode ini adalah perlunya telaah kritis mengenai bagaimana Indonesia dapat menyeimbangkan keterbukaan pasar global dengan perlindungan ekonomi kerakyatan, agar pertumbuhan tidak hanya berorientasi pada angka makro tetapi juga tercermin pada kesejahteraan rakyat secara merata.

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian historis dan analisis kritis, dapat disimpulkan bahwa perkembangan sistem ekonomi Indonesia sejak kemerdekaan hingga era Reformasi menunjukkan dinamika yang kompleks: dari etatisme dengan dominasi negara, beralih pada sistem campuran dengan pertumbuhan impresif namun timpang pada masa Orde Baru, hingga liberalisasi ekonomi pada era Reformasi yang semakin membuka diri terhadap globalisasi tetapi menyisakan persoalan pemerataan dan kedaulatan ekonomi. Pola ini menegaskan bahwa keberhasilan pembangunan ekonomi Indonesia tidak cukup ditentukan oleh pilihan sistem semata, melainkan juga oleh kualitas tata kelola, stabilitas politik, serta kemampuan menyeimbangkan antara efisiensi pasar dan prinsip keadilan sosial sesuai amanat Pasal 33 UUD 1945.

Penelitian ini memiliki keterbatasan karena sebagian besar analisis masih bertumpu pada kajian literatur dan data sekunder, sehingga belum sepenuhnya menangkap dinamika empiris di lapangan, khususnya pengalaman para pelaku ekonomi kecil, daerah, maupun sektor informal yang seringkali luput dari data resmi. Selain itu, penelitian ini lebih menyoroti aspek historis dan kebijakan makro, sementara dimensi mikro seperti perilaku konsumsi masyarakat, peran koperasi, serta kontribusi UMKM terhadap demokrasi ekonomi belum dieksplorasi secara mendalam. Oleh karena itu, penelitian mendatang disarankan untuk mengombinasikan studi literatur dengan penelitian lapangan melalui survei, wawancara, atau studi kasus di

berbagai daerah, agar diperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai bagaimana sistem ekonomi Indonesia berkembang, diimplementasikan, dan dirasakan secara nyata oleh masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Hadi, Q. M., Salsabila, S., Hidayat, R., & Ribawati, E. (2024). DINAMIKA EKONOMI INDONESIA ERA REFORMASI: PERUBAHAN, TANTANGAN DAN PROSPEK MASA DEPAN. *Sindoro: Cendikia Pendidikan*, 5(6), 51–60. <https://doi.org/10.9644/sindoro.v5i6.4138>
- Hermanita. (2021). *Perekonomian Indonesia* (1 ed.). CV Agree Media Publishing.
- Irwan, M. (2021). KEBUTUHAN DAN PENGELOLAAN HARTA DALAM MAQASHID SYARIAH. *Elastisitas : Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 3(2), Article 2. <https://doi.org/10.29303/e-jep.v3i2.47>
- Miftahudin. (2018). *LINGKUP PEREKONOMIAN INDONESIA* (1 ed.). Unsiq Press.
- Rahman, A. (2023). SISTEM EKONOMI GERAKAN BENTENG PADA MASA ORDE LAMA. *Storia: Jurnal Pendidikan Sejarah Dan Humaniora*, 4(1), 1–14.
- Setiawan, H. B. S. B. (2015). INFAQ DALAM TAFSIR AL-QUR'AN SURAT AL-BAQARAH AYAT 261. *Islamic Banking : Jurnal Pemikiran Dan Pengembangan Perbankan Syariah*, 1(1), 59–67. <https://doi.org/10.36908/isbank.v1i1.17>
- Sudarto, A. (2021). *Perekonomian Indonesia*. Penerbit Lampung Membangun.
- Sunardi, A., Afiah, W. N., Fadlah, S. N., & Ribawati, E. (2024). KRISIS MONETER 1997-1998: AKAR PENYEBAB, DAMPAK EKONOMI, DAN KEBIJAKAN PENANGANAN DI INDONESIA. *Sindoro: Cendikia Pendidikan*, 5(7), 21–30. <https://doi.org/10.9644/sindoro.v5i7.4197>
- Winanti, P. S. (2003). Development State dan Tantangan Globalisasi: Pengalaman Korea Selatan. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 7(2), 175–204.
- Zed, M. (2008). *Metode Penelitian Kepustakaan*. Yayasan Obor Indonesia.